

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang agraris, yaitu Negara yang mengandalkan berbagai sektor pertanian baik sebagai mata pencaharian ataupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian di Indonesia membentuk proporsi yang besar bagi devisa Negara, membantu menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber masyarakat untuk mendapatkan pendapatan (Saleh, 2020). Sehingga menjadikan sektor pertanian suatu pasar yang potensial untuk produk dalam Negeri, baik dijadikan sebagai barang produksi ataupun barang konsumsi. Hasil produksi pertanian menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga harga pangan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Harusnya sektor pertanian menjadi sektor yang perlu diperhatikan pemerintah, agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara adil dan merata. Sehingga perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dalam sektor pertanian melalui berbagai kebijakan.

Beras menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, karena itu permintaan yang selalu meningkat harus di imbangi oleh produksi yang terus meningkat. Dalam hal ini, meningkatnya produksi beras tidak akan efektif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani, apabila tidak diimbangi suatu sistem pemasaran yang efisien. Tidak efisiennya pemasaran beras akan mempengaruhi pendapatan petani, hal ini berkaitan dengan harga yang nantinya diterima oleh petani. Tidak efisiennya suatu pemasaran, bentuk pasar yang kurang bersaing, panjangnya rantai pemasaran, sarana transportasi tidak memadai, sistem kelembagaan pemasaran yang kurang sehat merupakan permasalahan

pemasaran yang sering terjadi, sehingga berpengaruh terhadap tingkat harga yang diterima petani (Roy, 2016).

Tabel 1.1 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Luas panen (ha)	Produktivitas	Produksi (ton)
Kabupaten			
Pacitan	20504,49	44,84	91941,66
Ponorogo	58080,19	55,48	322205,5
Trenggalek	20474,89	54,81	112213,57
Tulungagung	34584,26	56,8	196430,58
Blitar	36193,94	61,9	224027,19
Kediri	39448,75	56,49	222837,82
Malang	48397,75	58,08	281072,26
Lumajang	53466,4	53,1	283894,22
Jember	123591,19	49,91	616858,41
Banyuwangi	81552,77	54,6	445253,86
Bondowoso	53458,86	47,02	251371,94
Situbondo	30225,88	55,47	167665,54
Probolinggo	39464,38	49,1	193774,5
Pasuruan	53788,66	50,1	269463,05
Sidoarjo	34287,25	68,48	234788,11
Mojokerto	54993,37	61,78	339755,88
Jombang	56138,02	61,32	344236,34
Nganjuk	65066,04	61,45	399845,68
Madiun	68014,65	61,65	419292,44
Magetan	42231,51	61,72	260671,35
Ngawi	122500,97	63,44	777190,36
Bojonegoro	128863,83	53,71	692073,16
Tuban	91199,72	57,01	519934,36
Lamongan	140463,58	59,78	839724,43
Gresik	61643,05	59,65	367717,66
Bangkalan	39854,38	50,59	201620
Sampang	33052,04	47,27	156219,52
Pamekasan	20169,17	45,27	91313,32
Sumenep	38411,97	48,45	186090,84
Kota			
Kediri	1396,04	50,38	7032,99
Blitar	911,72	66,74	6084,58
Malang	2019,48	68,88	13909,7
Pasuruan	2055,26	52,57	10804,71
Mojokerto	700,93	50,87	3565,88
Madiun	1302,28	63,42	8259,39
Surabaya	1724,45	55,65	9596,78
Batu	791,96	63,53	5031,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2019

Dari Tabel 1.1 bisa dilihat Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten dengan hasil produksi padi terbesar di Jawa timur, yang selanjutnya disusul oleh Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Lamongan memiliki luas lahan mencapai 140463,58 Ha, dengan produksi mencapai 839.724,43 ton, serta produktivitasnya sebesar 59,78%. Lamongan menjadi sentra produksi pangan nasional yang telah diakui kualitasnya dan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Hasil produksi padi di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2018, hasil produksi padi mencapai 924.212 ton, hal ini menunjukkan adanya penurunan hasil produksi sebesar 84.487,57 ton. Penurunan produktivitas juga terjadi antara tahun 2018 dan 2019 yakni mengalami penurunan sebesar 1,07%. Penurunan hasil panen dan produktivitasnya sejalan dengan penurunan luas panen. Pada tahun 2018, luas panen di Kabupaten Lamongan mencapai 151.884 Ha. Sedangkan di tahun 2019, luas panen di Kabupaten Lamongan sebesar 140.463,58 Ha. Ini artinya Kabupaten Lamongan mengalami penurunan luas panen sebesar 11420,42 Ha.

Tabel 1.2 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tiap Kecamatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019

Kecamatan	luas panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (%)
sukorame	3944	30237	76,75
Bluluk	4401	32516	73,71
Ngimbang	6485	48090	74,3
Sambeng	5259	38773	73,88
Mantup	6755	50247	74,4
Kembangbahu	8255	61395	74,63
Sugio	10695	84418	78,93
Kedungpring	8637	67254	77,87
Modo	9197	69548	75,67
Babat	6991	52007	74,47
Pucuk	5688	47075	82,5
Sukodadi	5985	44129	73,81
Lamongan	4785	35126	73,03
Tikung	7567	57767	76,41
Sarirejo	7285	53382	73,4
Deket	3694	26918	72,46
Glagah	3994	29104	72,59

Kecamatan	luas panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (%)
Karangbinangun	4512	33320	72,66
Turi	4988	38852	77,8
Kalitengah	3043	22464	72,82
Karanggeneng	4100	30620	74,3
Sekaran	5843	42971	73,7
Maduran	4322	31750	73,61
Laren	6348	49771	78,38
Solokuro	3290	22759	68,98
Paciran	637	4327	67,9
Brondong	1144	7716	67,88

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Tahun 2019

Dari Tabel 1.2 bisa dilihat urutan Kecamatan yang menjadi penghasil padi terbesar di Kabupaten Lamongan. Kecamatan Sugio menjadi Kecamatan dengan produksi padi terbesar di Kabupaten Lamongan yang mempunyai luas panen sebesar 10.695 Ha, total produksi mencapai 84.418 ton, serta tingkat produktivitasnya sebesar 78,93%. Produksi padi terbesar selanjutnya adalah Kecamatan Modo dan Kecamatan Kedungpring, dengan total produksi padi di Kecamatan Modo sebesar 69.548 ton, sedangkan total produksi padi Kecamatan Kedungpring sebesar 67.254 ton. Banyaknya jumlah produksi padi di Kecamatan Sugio, menjadikan Kecamatan Sugio sebagai daerah pemasok kebutuhan beras bagi daerah Kabupaten Lamongan sendiri ataupun wilayah luar Kabupaten Lamongan.

Luas lahan pertanian di Kecamatan Sugio 6.199,0 Ha (65,65%) dari luas wilayah Kecamatan Sugio yaitu 9.443 Ha. Dari luas lahan pertanian tersebut 85,42% atau 5.295,0 Ha merupakan lahan sawah sedangkan sisanya 904,0 Ha (14,58%) merupakan lahan pertanian bukan sawah. Lahan sawah di Kecamatan Sugio mendapat pengairan teknis, setengah teknis dan tadah hujan. Pada tahun 2019, tanaman pangan khususnya tanaman padi, masih menjadi tanaman primadona bagi petani, bila air pengairan mencukupi, maka petani akan berusaha bercocok tanam padi hingga musim tanam ketiga. Hal ini ditunjang dengan

keberadaan Waduk Gondang yang bisa menampung air untuk kebutuhan pengairan petani. Sehingga bisa dimaklumi bila Kecamatan Sugio merupakan salah satu sentra atau lumbung beras bagi Kabupaten Lamongan.

Sumber daya alam yang mendukung, menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang utama di kecamatan Sugio, hal ini menjadikan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya untuk melakukan usaha dalam pertanian. Kecamatan Sugio menjadi Kecamatan dengan hasil produksi padi tertinggi di Kabupaten Lamongan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kegiatan usahatani para petani. Usahatani dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara pengalokasian sumberdaya (lahan, modal, tenaga kerja, serta manajemen) yang dimiliki oleh petani untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Usahatani sendiri tidak terlepas dari kegiatan produksi, yang merupakan suatu kegiatan memanfaatkan dan mengalokasikan faktor produksi pertanian. Dengan adanya suatu tujuan untuk menambah kegunaan ataupun menghasilkan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Karmini, 2018).

Dalam kegiatan usahatani, pemenuhan input produksi merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Sarana produksi dan modal operasional petani merupakan modal dalam input produksi yang penting selain lahan, tenaga kerja, dan keterampilan. Pemenuhan sarana produksi terkait bibit, obat/pestisida, dan pupuk mendukung kegiatan dalam usahatani sangat penting untuk dilakukan, mengingat sarana produksi menjadi bahan dalam kegiatan produksi usahatani. Pemenuhan sarana produksi yang tercukupi dengan baik dan kemudahan akses untuk mendapatkannya, tentunya menjadi faktor untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Dalam kegiatan produksi usahatani hal yang tidak kalah penting yakni modal operasional atau modal uang untuk menjalankan

kegiatan usahatani. Modal operasional disiapkan petani untuk melakukan pembelian segala kebutuhan produksi atau sejatinya menjadi biaya produksi. Sehingga keberadaan modal operasional sangat dibutuhkan bagi para petani. Perlu diketahui cara petani dalam pemenuhan sarana produksi dan modal operasional, serta kemungkinan adanya hambatan didalamnya, guna perencanaan dalam kegiatan usahatani.

Dalam kegiatan produksi usahatani yang dilakukan para petani, tidak terlepas dari biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi atau proses produksi. Biaya produksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Penggunaan biaya produksi tentunya dilakukan setiap pelaku usaha di segala sektor, tidak terkecuali dibidang pertanian, khususnya usahatani padi. Biaya produksi yang digunakan para petani digunakan untuk menghasilkan output komoditi pertanian. Penggunaan biaya produksi tentunya dimaksudkan petani untuk menghasilkan pendapatan melalui kegiatan usahatani. Pengalokasian biaya produksi secara tepat tentunya akan mengakibatkan produksi yang dihasilkan dan produktivitasnya tinggi. Dalam kegiatan usahatani semakin banyaknya hasil produksi (output) maka penerimaan yang diperoleh petani juga akan tinggi.

Terlepas dari itu semua, hasil produksi yang tinggi serta kualitas hasil panen yang baik tentunya tidak hanya disebabkan oleh input produksi yang digunakan, serta biaya produksi yang dikeluarkan. Mengingat kegiatan produksi usahatani padi menjadi sektor yang rentan akan resiko usahatani. Resiko tersebut tentunya melekat pada setiap kegiatan usahatani yang dijalankan para petani. Adanya resiko usahatani tentunya akan berdampak terhadap pendapatan atau keuntungan usahatani. Resiko usahatani disebabkan oleh iklim/cuaca maupun

hama/penyakit yang menjadi faktor munculnya resiko yang diterima petani. Kondisi iklim/cuaca maupun serangan hama/penyakit membuat ketidakpastian kuantitas dan harga hasil panen. Fluktuasi harga akibat kualitas hasil panen seringkali menjadi alasan bagi pembeli untuk menekan harga ditingkat petani, belum lagi ditambah adanya kecenderungan harga yang cenderung rendah pada saat panen raya berlangsung. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada keuntungan petani, sebagai bentuk resiko yang sudah melekat pada kegiatan usahatani.

Dalam kegiatan pasca panen, petani sebagai produsen cenderung menjual gabah sebelum diproses menjadi beras. Padahal ketika bentuk penjualan berupa beras, maka bisa meningkatkan nilai jual lebih tinggi. Petani hanya mengambil sebagian hasil produksinya untuk disimpan sendiri, sebagai pemenuhan kebutuhan mereka akan pangan, selebihnya dilakukan penjualan. Penjualan tersebut didasari oleh kebutuhan modal akan pembayaran biaya pemanenan, biaya hidup para petani, serta menjadi modal operasional di musim tanam padi berikutnya. Kecenderungan petani untuk langsung menjual hasil panen sesat setelah kegiatan pemanenan tentunya akan menghasilkan nilai jual yang rendah, bila dibandingkan dengan penjualan dalam bentuk gabah kering giling atau berupa beras. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya daya tawar petani dalam kegiatan tataniaga hasil pertaniannya, sekaligus adanya resiko usahatani yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya.

Kegiatan tataniaga yang dimulai dari petani padi di Kecamatan Sugio, tentunya dilanjutkan oleh lembaga tataniaga hingga sampai pada konsumen akhir. Konsumen akhir tidak hanya terbatas pada penduduk Kecamatan Sugio saja, melainkan juga penduduk di Kabupaten Lamongan, maupun luar Kabupaten

Lamongan. Kondisi ini sangat wajar terjadi, mengingat Kecamatan Sugio menjadi penghasil padi terbesar, sehingga menjadi pemasok kebutuhan beras bagi penduduk luar Kabupaten Lamongan. Kondisi tersebut membuat jaringan pola jalur tataniaga yang saling terhubung antar lembaga tataniaga. Penyaluran komoditi mulai dari petani padi di Kecamatan Sugio tentunya akan membentuk sistem tataniaga. Sistem tataniaga merujuk kepada para pelaku yang menjalankan kegiatan tataniaga, saluran tataniaga, fungsi tataniaga, struktur pasar dan perilaku pasar yang terbentuk, serta kinerja pasar. Melalui pemahaman terhadap sistem tataniaga, nantinya akan diketahui efisien tidaknya sistem tataniaga yang ada. Jika ditemukan tidak efisiennya sistem tataniaga, maka bisa dilakukan perbaikan guna sistem tataniaga tersebut dapat bekerja secara efisien.

Adanya para pelaku tataniaga dalam kegiatan tataniaga suatu komoditi tentunya akan membentuk suatu persaingan pasar, dengan segala pola perilaku para pelaku tataniaga atau lembaga tataniaga. Persaingan pasar merujuk kepada bagaimana struktur pasar terbentuk, yang akan mempengaruhi perilaku-perilaku para lembaga tataniaga. Menurut Asmarantaka et al., (2017), akibat dari terbentuknya suatu struktur dan perilaku pasar yaitu adanya penilaian terhadap suatu sistem pemasaran yang disebut sebagai kinerja pasar. Lebih lanjut lagi, struktur pasar merupakan tipe atau jenis-jenis pasar. Perilaku pasar merupakan suatu perilaku pelaku tataniaga atau partisipan (pembeli dan penjual), yang berkaitan dengan strategi atau beragam reaksi yang dilakukan pelaku tataniaga di pasar, baik secara individu atau kelompok, dalam hubungan kompetitif atau negosiasi untuk suatu tujuan pemasaran tertentu. Kinerja pasar nantinya akan menunjukkan efisien tidaknya sistem tataniaga yang ada. Kinerja pasar dilihat melalui bagaimana pasar bersaing, yang mana apabila struktur pasar bersaing

secara sempurna, maka pasar tersebut tergolong efisien. Kinerja pasar juga ditunjukkan melalui kondisi margin tataniaga yang ada, persebaran rasio keuntungan dan biaya, serta bagian yang diterima para petani (*Farmer's Share*).

Petani dalam pemasaran hasil produksinya tentunya melalui jalur pemasaran atau biasa disebut juga jalur tataniaga produk mulai dari produsen (petani) hingga konsumen akhir. Dalam tataniaga para petani berada dalam suatu jaringan distribusi atau transfer hak kepemilikannya hingga konsumen melalui lembaga tataniaga dan segala fungsinya. Produsen memiliki peran utama dalam menghasilkan barang (output), sedangkan lembaga tataniaga yang lainnya menyalurkan komoditas hasil petani dalam waktu, tempat, maupun bentuk yang diinginkan konsumen (Saleh, 2020). Penyaluran barang dari produsen (petani) hingga konsumen akhir yang melalui berbagai lembaga pemasaran atau lembaga perantara (*Middleman*) nantinya akan membentuk suatu saluran pemasaran, dan biasanya disebut saluran tataniaga. Saluran tataniaga inilah yang nantinya membedakan fungsi tataniaga yang dijalankan oleh setiap lembaga tataniaga. Perbedaan fungsi tataniaga akan menyebabkan adanya suatu perbedaan biaya tataniaga yang dikeluarkan oleh para petani.

Panjangnya saluran tataniaga membuat biaya tataniaga semakin tinggi sehingga membuat saluran tersebut semakin tidak efisien. Setiap saluran tataniaga yang dialami oleh para petani di Kecamatan Sugio tentunya berbeda. Perbedaan saluran inilah yang akan membawa perolehan keuntungan yang berbeda pula pada masing masing lembaga yang terlibat dalam kegiatan tataniaga. Persebaran keuntungan secara tidak merata pada setiap lembaga tataniaga membuat saluran tataniaga tersebut tidak efisien. Serta perbedaan saluran tersebut juga akan mengakibatkan perbedaan margin tataniaga di setiap

saluran tataniaga. Margin tataniaga yang tinggi pada suatu saluran akan menyebabkan saluran tataniaga tersebut tidak efisien. Margin tataniaga yang tinggi tentunya membuat bagian harga (*Farmer's Share*) yang diterima petani semakin kecil. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa pola saluran tataniaga yang ditempuh petani tersebut tidak efisien bagi petani. Hubungan yang terbalik antara margin tataniaga dan *farmer's share*, semakin rendah margin tataniaga, maka akan semakin efisien, begitupun sebaliknya. Sedangkan semakin rendah nilai *farmer's share*, maka akan semakin tidak efisien, begitupun sebaliknya.

Melalui margin tataniaga, rasio keuntungan dan biaya, serta *farmer's share* nantinya dapat diketahui pola saluran yang efisien dan kurang efisien, serta cara untuk memperbaikinya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, analisis margin tataniaga, rasio keuntungan dan biaya, serta *farmer's share* tentunya digunakan untuk mengetahui kinerja pasar. Pasar tersebut bekerja secara efisien atau tidak, jika tidak efisien maka perlu dicari faktor yang membuat pasar atau kegiatan tataniaga tersebut tidak berjalan efisien, serta upaya yang bisa dilakukan guna mengatasi hal tersebut. Dilakukannya analisis margin tataniaga, rasio keuntungan dan biaya, serta *farmer's share* nantinya dapat diketahui pola saluran yang efisien yang mampu diterapkan. Nantinya bisa digunakan untuk para petani untuk memilih pola saluran yang lebih menguntungkan, atau memangkas saluran yang dinilai lebih merugikan. Petani sebagai produsen tentunya harus mendapatkan pendapatan yang semestinya, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Selain perubahan pola saluran melalui pemangkasan, perubahan bentuk penjualan juga bisa dilakukan jika kegiatan tataniaga pada tingkat petani kurang menguntungkan.

Dalam proses kegiatan tataniaga yang dilakukan oleh para petani kepada pihak lain, pada dasarnya suatu kegiatan yang digunakan sebagai upaya untuk

melakukan transaksi hak-hak kepemilikan para petani kepada pihak lain. Namun pada prakteknya, kegiatan transaksi hak kepemilikan para petani tersebut berada dalam kondisi yang asimetris. Hal ini berkaitan dengan posisi daya tawar yang tidak setara antara petani dan pembeli (*Burgaining Position*), maupun ketidaksetaraan informasi (*Information Asymmetric*). Petani dalam penentuan harga hanya mengikuti pemberian harga dari pembeli. Rendahnya daya tawar para petani membuat mereka hanya berposisi sebagai penerima harga (*Price Taker*), sedangkan para pembeli berposisi sebagai pembuat harga (*Price Maker*). Ketidaksetaraan informasi pasar juga terjadi antara petani dan pembeli. Pembeli cenderung memiliki informasi pasar yang luas dari pada petani. Kondisi ini membuat pembeli memiliki segala informasi tentang fluktuasi harga pasar, serta jaringan yang luas. Kondisi ini merujuk kepada kemampuan pembeli dalam penyesuaian harga pasar yang berkaitan dengan keuntungan yang ingin mereka dapatkan (margin tataniaga).

Pembeli bisa saja menekan harga para petani dengan segala keterbatasan informasi yang dimiliki oleh para petani. Kondisi ini tidak terlepas dari perilaku rasionalitas terbatas dan perilaku opportunistik. Rasionalitas terbatas merujuk kepada informasi yang tidak lengkap atau ketidakpastian suatu informasi. Sedangkan perilaku opportunistik merujuk kepada perilaku manusia untuk selalu mencari keuntungan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pembeli lebih memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan para petani. Prinsip dasar sifat opportunistik para pembeli bisa saja memanfaatkan keterbatasan informasi dari para petani. Petani dalam sifat opportunistiknya tentu saja ingin mencari keuntungan. Namun petani terbatas pada kemampuan daya tawar, serta informasi yang kurang. Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan pembeli untuk

menekan harga di tingkat petani sebagai akibat adanya ketidakpastian suatu pasar. Kondisi ini merujuk kepada ketidakpastian pasar, yakni ketidakpastian harga akibat kualitas komoditi maupun fluktuasi harga saat panen raya, yang sejatinya sebagai bentuk resiko dalam kegiatan usahatani.

Biaya transaksi muncul sebagai bentuk adanya perilaku rasionalitas terbatas dan perilaku opportunistik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Biaya transaksi merupakan biaya yang muncul untuk pencarian informasi. Pencarian informasi tersebut digunakan para petani untuk mengukur ketidakpastian pasar, yang sejatinya pencarian informasi tersebut sebagai bentuk untuk melindungi hak kepemilikan para petani. Sehingga pada saat kesepakatan-kesepakatan dibuat, petani sudah siap dengan segala informasi yang mereka dapatkan. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan para petani. Informasi tersebut mencegah atau sebagai antisipasi apabila pembeli memberikan harga tidak pada sebagaimana mestinya atau di bawah pasar. Sehingga pada saat negosiasi atau pembuatan keputusan-keputusan yang termanifestasikan dalam kontrak, petani tidak mengalami kerugian, dan memperoleh pendapatan yang semestinya.

Biaya transaksi lainnya muncul terhadap pengawasan pelaksanaan yang telah dibuat antara kedua pihak yang bertransaksi, yakni petani dan pembeli. Petani dalam kegiatan tataniaga tentunya melakukan pengawasan (monitoring) terhadap hak kepemilikannya hingga mereka mendapatkan pendapatannya, atau pembayaran hasil panen. Kondisi tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak kepemilikan para petani dari segala resiko yang mungkin bisa terjadi, dan merupakan suatu bentuk untuk menghindari kerugian. Biaya transaksi tentu saja berdampak kepada pendapatan petani, baik itu untuk upaya pendapatan yang

semestinya, maupun untuk penambahan kontribusi biaya yang harus dikeluarkan para petani. Sehingga biaya transaksi perlu dipahami kondisinya pada kegiatan tataniaga pertanian, sehingga mampu mencari segala komponen biaya transaksi yang terbentuk di dalamnya. Mengingat biaya transaksi pengeluarannya jarang disadari oleh para petani itu sendiri, dan dilakukan pengukuran, maka perlu adanya kesadaran para petani untuk melihat kondisi biaya transaksi yang mereka keluarkan.

Pada dasarnya, timbulnya biaya transaksi yang tinggi dalam suatu kegiatan ekonomi (transaksi), maka kelembagaan yang didesain tersebut tidak efisien, begitupun sebaliknya. Sehingga perlu mencari mekanisme atau desain aturan main (kelembagaan) yang membangun kesetaraan antar pelaku ekonomi. Kelembagaan sendiri dimaknai sebagai suatu organisasi atau lembaga, sekaligus dimaknai sebagai aturan, atau mekanisme yang mengatur pola perilaku manusia, tidak terkecuali perilaku manusia dalam ekonomi. Sehingga untuk membangun kesetaraan tersebut pada dasarnya diperlukan perbaikan sistem atau aturan yang mengatur segala tindakan para pelaku kegiatan tataniaga. Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan, yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi (Asmarantaka et al., 2020). Sehingga dalam pembentukan segala macam aturan atau mekanisme tersebut dibutuhkan kelembagaan pertanian seperti kelompok tani, Gapoktan, BPP, maupun kebijakan pemerintah sebagai dukungan.

Kegiatan usahatani padi selama satu musim yang dilakukan petani tentunya dimaksudkan para petani untuk memperoleh pendapatan melalui penggunaan input produksi untuk dijadikan sebagai output yang siap dijual. Pendapatan atau keuntungan petani dalam kegiatan usahatani tentunya merujuk kepada

penerimaan petani dikurangi dengan keseluruhan biaya yang ada. Perhitungan pendapatan bersih petani pada umumnya hanya dilakukan perhitungan terkait biaya produksi saja, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Padahal munculnya biaya yang harus dikeluarkan para petani tidak hanya biaya produksi mulai tanam hingga panen saja, melainkan ada biaya lain yang muncul seperti yang dijelaskan sebelumnya. Biaya tataniaga muncul saat kegiatan tataniaga atau pemasaran hasil panen, serta untuk menjalankan fungsi tataniaga yang ada. Biaya lain yang perlu dihitung yakni suatu biaya transaksi yang timbul dalam menjalankan kegiatan pemasaran hasil panen mereka.

Setelah mengetahui penerimaan petani dari hasil panen yang dihasilkan, serta keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan petani, maka bisa dihitung pendapatan para petani. Untung tidaknya usahatani yang dijalankan para petani dalam satu musim tentunya perlu diketahui. Setelah mengetahui kondisi pendapatan atau keuntungan para petani, penting juga mengetahui kondisi penggunaan pendapatan petani. Setelah mengetahui kondisi pendapatan petani dan kondisi penggunaan pendapatan petani, layak tidaknya usahatani selama satu musim juga perlu diketahui. Kelayakan usahatani pun juga tidak kalah penting untuk dilakukan analisis guna mengetahui layak tidaknya usahatani dalam musim yang sudah dilalui maupun untuk dilaksanakan pada musim berikutnya. Pendapatan atau keuntungan usahatani dan kelayakan usahatani yang dijalankan dalam satu musim ketika dapat diketahui, maka akan menjadi sebagai bahan pengambilan keputusan para petani. Sekain itu, juga menjadi bahan perencanaan ke depan untuk para petani, guna memaksimalkan keuntungannya dalam melakukan kegiatan usahatani dalam satu musim.

Perlu adanya penelitian yang mendalam terhadap para petani dalam menjalankan kegiatan usahatani padi, mulai dari pemenuhan sarana produksi dan modal operasional, selanjutnya kegiatan produksi usahatani sampai dengan pemasaran hasil produksi atau tataniaga pertanian. melalui perhitungan margin tataniaga, rasio keuntungan dan biaya dalam tataniaga, serta analisis *farmer's share* di tiap saluran tataniaga para petani, nantinya dapat diketahui saluran tataniaga yang paling efisien. Analisis struktur pasar dan perilaku pasar juga akan menunjukkan efisien tidaknya suatu pasar atau kegiatan tataniaga yang ada. Analisis biaya transaksi pada tingkat petani juga menunjukkan bagaimana efisien tidaknya kelembagaan yang didesain. Analisis pendapatan usahatani melalui perhitungan biaya produksi, biaya tataniaga, dan biaya transaksi nantinya dapat diketahui besaran pendapatan petani dalam satu musim. Sedangkan analisis *Break Even Point* (BEP) serta R/C rasio petani digunakan untuk mengetahui kelayakan usahatani yang dijalankan para petani padi di Kecamatan Sugio selama satu musim. Melalui ulasan di atas peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian yang berjudul “analisis biaya transaksi pada tataniaga pertanian dan pendapatan petani padi di kecamatan sugio kabupaten lamongan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi pemenuhan sarana produksi dan modal operasional para petani dalam kegiatan usahatani padi ?
2. Bagaimana sistem tataniaga dan efisiensi tataniaga beras di Kecamatan Sugio?

3. Bagaimana biaya transaksi dalam tataniaga beras petani di Kecamatan Sugio?
4. Bagaimana kondisi pendapatan dan kelayakan usahatani petani padi di Kecamatan Sugio?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi pemenuhan sarana produksi dan modal operasional para petani dalam kegiatan usahatani padi.
2. Untuk mengetahui sistem tataniaga dan efisiensi tataniaga beras di Kecamatan Sugio.
3. Untuk mengetahui biaya transaksi dalam tataniaga beras di Kecamatan Sugio.
4. Untuk mengetahui kondisi pendapatan dan kelayakan usahatani petani padi di Kecamatan Sugio.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang petani padi di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, mulai dari pemenuhan sarana produksi, kegiatan usahatani, hingga kegiatan tataniaga komoditi yang dihasilkan petani padi. Penelitian ini selanjutnya mencoba menggali biaya transaksi yang muncul dalam kegiatan tataniaga hasil pertanian para petani. Hasil penelitian ini juga memberikan informasi pendapatan usahatani dan kelayakan usahatani petani padi di Kecamatan Sugio.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai alternatif wawasan bagi petani dan pihak terkait yang memiliki permasalahan serupa, untuk menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi. Sekaligus sebagai informasi dan bahan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan dan mengatasi permasalahan petani di Kecamatan Sugio, serta kebijakan untuk mengatasi permasalahan dalam tataniaga. Melalui penelitian ini nantinya mampu digunakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan para petani di Kecamatan Sugio.